

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia lahir dalam kondisi yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memiliki tujuan hidup serta cita-cita yang beragam. Namun dalam menggapai cita-cita tidaklah selalu mudah karena akan banyak hambatan yang dihadapi, salah satu hambatannya adalah keterbatasan fisik dan mental.

Dahulu orang menyebut seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental sebagai penyandang cacat, lalu kemudian diganti dengan sebutan penyandang disabilitas. Disabilitas adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata penyandang cacat. Kata disabilitas dianggap sebagai sebuah sebutan yang dianggap lebih baik untuk menyebut penyandang cacat. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik dan/atau intelektual dalam jangka waktu lama sehingga ketika berinteraksi dengan sebuah lingkungan dapat mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas membutuhkan campur tangan orang lain untuk dapat hidup seperti orang normal tetapi disisi lain para penyandang disabilitas juga ingin menjadi individu yang mandiri dan hidup setara

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Butir 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

dengan orang lain tanpa membutuhkan bantuan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sewajarnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, yang dimaksud perlakuan khusus yakni sebagai upaya perlindungan dari kerentanan dari berbagai tindak diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.²

Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang telah dimiliki setiap manusia, bahkan sejak manusia masih berada di dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasi sendiri.³ Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mempertahankan hidupnya termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa negara kita telah memberikan perlindungan khusus terkait dengan harkat serta martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.⁴ Pemerintah telah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat termasuk hak bagi penyandang disabilitas agar dapat setara dengan orang normal agar tidak terjadi diskriminasi. Para penyandang disabilitas ini membutuhkan

² Majda El Muhtaj, **Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 273.

³ Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 102.

perhatian lebih dibandingkan orang normal dalam segala hal. Termasuk yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah fasilitas umum dan transportasi umum. Tidak hanya transportasinya melainkan akses untuk mempergunakan transportasi tersebut.

Negara harus memperhatikan segala hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan aksesibilitas. Seperti yang telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa :⁵

“Penyandang Disabilitas memiliki hak : a. Hidup; b. Bebas dari stigma; c. Privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; h. politik; i. Keagamaan; j. Keolahragaan; k. Kebudayaan dan pariwisata; l. Kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan publik; o. Perlindungan dari bencana; p. Rehabilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. Pendapatan; s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u, berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Aksesibilitas merupakan ukuran dalam sebuah kenyamanan atau untuk mencapai suatu kemudahan dalam hubungan suatu pencapaian lokasi yang satu dengan yang lainnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas salah satunya untuk menjangkau sebuah alat transportasi, sehingga pemerintah harus memperhatikan dalam pembangunan fasilitas

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

umum atau transportasi yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia, dan untuk meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat.⁶

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa:

“Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan, b. Mendapat Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.”

Namun sering kita temukan keadaan dilapangan berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Dikebanyakan fasilitas umum masih sangat banyak yang tidak memberikan akses bagi penyandang disabilitas misalkan tidak memberi jalan khusus yang dapat mempermudah tuna netra.

Pemerintah maupun Pemerintah Daerah wajib memberikan aksesibilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas umum seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 242 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit”.⁷

Dari Undang-Undang yang tertulis diatas maka wajib bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberikan fasilitas atau akses bagi penyandang disabilitas agar mereka lebih mudah

⁶ Ibid.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak fasilitas-fasilitas umum dibangun tetapi tidak memikirkan tentang aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Kota Malang merupakan Kota yang terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Malang menjadi kota besar nomor dua di Jawa Timur setelah Surabaya. Selain menjadi kota wisata, Kota Malang juga menjelma menjadi kota pelajar dengan adanya universitas-universitas yang terkemuka. Universitas-universitas yang ada di Kota Malang cukup terkenal di Indonesia sehingga membuat banyak orang ingin melanjutkan pendidikan disana. Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.⁸ Seiring berjalannya waktu Kota Malang menjadi lebih padat karena hadirnya para pendatang yang ingin melanjutkan pendidikan dan bekerja. Semakin padatnya Kota Malang tentu juga diikuti dengan semakin berkembangnya fasilitas-fasilitas umum yang ada.

Ada banyak akses yang digunakan para pendatang maupun penduduk asli apabila ingin keluar masuk Kota Malang. Salah satunya menggunakan alat transportasi umum yakni bus. Alat transportasi ini lebih sering dipilih oleh sebagian orang yang akan bepergian karena dianggap sebagai transportasi yang murah dan aksesnya yang lebih mudah karena untuk waktu keberangkatannya relatif lebih sering dibandingkan menggunakan kereta api atau pun pesawat terbang. Kota Malang memiliki

⁸ <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> (diakses pada 3 Maret 2017)

Terminal Landungsari yang terletak di Jalan Tlogomas, Landungsari, Dau, Malang. Terminal Landungsari adalah gerbang Kota Malang dari arah barat dan merupakan terminal terpadu yang melayani angkutan-angkutan dalam kota maupun antar kota di dalam provinsi. Terminal ini sebagai pengintegritas (penghubung) dari terminal-terminal yang ada di wilayah Malang Raya, Kota Batu, Kediri, Jombang, dan Tuban.

Dengan adanya terminal Landungsari yang merupakan gerbang barat Kota Malang yang melayani angkutan ke dalam ataupun keluar Kota Malang mengharuskan adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang. Fasilitas yang ada tidak hanya memenuhi faktor kenyamanan tetapi juga harus memudahkan bagi para calon penumpang yang akan menggunakan bus sebagai sarana transportasi. Sebagai terminal sedang yang jumlah pengunjungnya cukup besar tidak menutup kemungkinan dari beberapa calon penumpang bus yang merupakan seorang penyandang disabilitas. Pemerintah wajib memberikan fasilitas khusus di Terminal Landungsari untuk memudahkan para penyandang disabilitas mengakses fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak bagi penyandang disabilitas, menunjang mobilitas serta melindungi dari diskriminasi untuk penyandang disabilitas.

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

NO.	Tahun Peneliti an	NamaPenel iti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	2011	Galih Hapsari Putri, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta	Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik di Kota Surakarta)	1. Bagaimana Konsep ruang publik di Kota Surakarta? 2. Bagaimana aksesibilitas difabel dalam ruang publik di kota Surakarta?	1. Skripsi ini mendalami tentang konsep penataan ruang publik 2. Bukan merupakan penerapan Undang- Undang tetapi lebih mengacu pada akses pada ruang publik bagi difabel.

2.	2012	Novita Apriyani, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan (studi kasus Universitas Indonesia)	<p>1. Penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata sehingga keberadaannya sering tidak mendapat perhatian terutama dalam hal penyediaan aksesibilitas</p> <p>2. banyaknya jumlah keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia namun belum diimbangi dengan penyediaan aksesibilitas yang layak terutama pada bangunan institusi pendidikan</p>	<p>1. penelitian ini mengarah kepada bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Meneliti bagaimana penerapan aksesibilitas tersebut dapat sesuai standar atau tidak.</p>
----	------	---	--	---	---

				khususnya universitas	
3.	2014	Andi Sulastri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar	Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar	<p>1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makasar?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas?</p>	<p>1. Lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengambil di Kota Makasar.</p> <p>2. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada kewajiban negara untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p>

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penerapan**

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang?
2. Apa hambatan dan solusi dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas umum di Terminal Landungsari.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa hambatan dan solusi dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas umum di Terminal Landungsari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum administrasi negara khususnya mengenai pengaturan kebijakan publik agar dapat melindungi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai bahan untuk acuan bagi pemerintah agar dalam membuat peraturan perundangan-undangan khususnya yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dapat benar-benar melindungi hak penyandang disabilitas secara maksimal.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Dari penelitian ini diharapkan para penyandang disabilitas dapat mendapat ruang atau fasilitas secara khusus agar dapat hidup layak serta memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati fasilitas umum untuk menunjang hidup bagi para penyandang disabilitas. Diharapkan para penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan secara normal seperti manusia pada umumnya

c. Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu, memudahkan dan dapat dijadikan sebuah bahan bagi mahasiswa-

mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian yang sistematis, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan hukum yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa teori-teori serta kajian-kajian yang berhubungan dengan judul penelitian. Teori dan kajian yang dikemukakan didapat dari buku-buku, artikel, maupun internet yang berhubungan dengan judul penelitian. Seperti teori mengenai Kajian Umum tentang Penerapan (Implementasi), Kajian Umum tentang Aksesibilitas, Kajian Umum tentang Fasilitas Umum, Kajian Umum tentang Disabilitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema yang diambil penulis yaitu Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Dalam Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum di Terminal Landungsari.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memiliki isi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan semua orang.